

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA NASIONAL BOROBUDUR

DEVELOPMENT STRATEGY OF BOROBUDUR NATIONAL TOURISM AREA

Arif Sofianto

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pemuda 127-133 Semarang

Email: 01arifsofianto@gmail.com

Diterima: 20 April 2018, Direvisi: 12 Mei 2018, Disetujui: 28 Mei 2018

ABSTRAK

Kawasan Borobudur dan sekitarnya termasuk salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan asing ke kawasan ini sebanyak 2 juta wisatawan asing, dan 11 juta wisatawan domestik pada tahun 2019. Di sisi lain, Balai Konservasi Borobudur (BKB) yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan Candi Borobudur telah membuat kajian bahwa daya tampung Borobudur hanya 123 orang naik bersamaan di atas candi, dan 528 orang di halaman candi. Saat ini jumlah wisatawan yang naik 10 kali lipat, dan terdapat indikasi kerusakan. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah; 1) bagaimana solusi pengelolaan KSPN Borobudur agar terjadi sisi kelestarian serta tercapai target kunjungan, 2) bagaimana peran yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah di sekitar Kawasan Borobudur untuk menyambut penetapan status kawasan dan proyek strategis yang akan dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan langsung, serta penelusuran data sekunder melalui berbagai dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles & Huberman. Penelitian dilakukan di sekitar kawasan Borobudur, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kota Magelang. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) solusi pengelolaan kawasan wisata Borobudur ialah dengan mengubah mindset wisata tidak lagi berpusat pada Candi Borobudur semata, tetapi pariwisata berbasis *landscape* budaya dan masyarakat, dimana Borobudur menjadi salah satu bagiannya. Paradigma wisata bergeser dari *monument-centric* ke kawasan lebih luas dan tidak lagi terpusat, tetapi pelibatan aktif masyarakat. 2) Pemerintah daerah (Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kota Magelang) selayaknya berbenah dengan berbagai program pembangunan pendukung dalam rangka meningkatkan percepatan daya saing daerah dan menangkap peluang pengembangan ekonomi untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Borobudur, Wisata, Kawasan wisata

ABSTRACT

Borobudur area and its surroundings are one of the National Tourism Strategic Areas (KSPN). The government targets tourist arrivals to the Borobudur area to reach 2 million foreign tourists, and 11 million domestic tourists by 2019. On the other hand, the Borobudur Conservation Center (BKB) which is responsible for maintaining Borobudur Temple has made study that Borobudur's capacity is only 123 people rose above the temple in one time, and 528 people in the temple yard. This time, the number of tourists rose 10-fold, and there were indications of damage. In this regard, the purpose of this study is; 1) How is the solution to the management of Borobudur

KSPN so that there is a sustainability side as well as the target of visits, 2) What role can the local government around the Borobudur area take to determine the status of the area and the strategic project to be implemented. This research was conducted using qualitative. Data is collected through interviews and direct observation, as well as tracking secondary data through various documents. Data analysis was performed using interactive analysis made by Miles & Huberman. The study was conducted around the Borobudur area, namely the Magelang Regency, Purworejo Regency, and Magelang City,. The conclusions of this study are: 1) the solution for managing the Borobudur tourist area is to change the mindset of tourism no longer centered on Borobudur Temple alone, the cultural and community landscape, and Borobudur making one of its parts. The tourism paradigm shifts from the monument-centric to the wider area and is no longer centralized, but the active involvement of the community. 2) Local governments (Magelang Regency, Purworejo Regency, and Magelang City) should improve with various supporting development programs in order to increase the acceleration of regional competitiveness and increase economic development opportunities to increase regional development and community welfare.

Keywords: Borobudur, Wisata, Tourist area

PENDAHULUAN

Kawasan Borobudur dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan pariwisata andalan nasional. Pada tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur. Borobudur beserta Jogjakarta, Dieng, Sangiran-Solo, Karimunjawa-Semarang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Pemerintah menetapkan target kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan 11 juta wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2019 di wilayah ini. Kunjungan di Candi Borobudur sendiri pada saat ini sekitar 3-4 juta wisatawan, 500 ribu diantaranya adalah wisatawan asing.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program antara lain: pembentukan Badan Otorita Borobudur, Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), program pembangunan jalan tol Bandara NYIA-Semarang melewati Kabupaten Magelang, dan pengaktifan kembali rel kereta lama. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan wisata kawasan Borobudur sesuai hasil analisis Susanty, dkk (2017)

bahwa strategi keberhasilan kawasan Borobudur adalah pengembangan infrastruktur menuju objek-objek wisata lainnya yang terdapat di kawasan Borobudur, termasuk Dieng.

Kawasan ini akan dikelola oleh Badan Otorita Borobudur (BOB) yang dibentuk sebagai pengelola kawasan terintegrasi, akan bertanggungjawab dalam koordinasi wisata antara wilayah DIY dan Jateng. Wilayah kerja BOB meliputi empat kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), yaitu Borobudur-Jogja, Dieng, Solo - Sangiran dan Semarang - Karimunjawa. Badan ini diresmikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 19 Juli 2017. BOB akan menempati lahan 300 hektar (lahan perhutani) di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang.

New Yogyakarta International Airport (NYIA) berada di Kulonprogo, dibangun pada tahun 2017 – 2019, dan akan beroperasi mulai tahun 2020. Jalan Tol Bandara NYIA – Magelang – Semarang juga akan dibangun melewati sisi timur kawasan Borobudur. Jalur kereta api Yogyakarta – Magelang juga sudah rencana direncanakan akan diaktivasi

kembali. Jalan TOL Semarang – Yogya juga akan dibangun untuk mempermudah akses Borobudur dari Kota Semarang. Langkah-langkah tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka mempermudah akses bagi wisatawan menuju Borobudur dan sekitarnya dari berbagai arah.

Masyarakat maupun pemerintah daerah di sekitar kawasan Borobudur memberikan tanggapan cukup beragam. Secara umum mendukung pengembangan kawasan wisata Borobudur, namun terdapat perbedaan dalam beberapa hal seperti menyikapi pembangunan infrastruktur penunjang, misalnya jalan Tol sebagian mendukung sebagian menolak. Sebagian pemerintah daerah (Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo) menginginkan pembukaan akses transportasi daerah agak terisolir seperti kawasan perbukitan Menoreh.

Dari berbagai kondisi yang ada, setidaknya terdapat 3 isu utama terkait dengan pengembangan kawasan wisata Borobudur ini, khususnya terkait dengan Candi Borobudur. *Pertama* adalah persoalan pelestarian atau konservasi, dimana daya dukung Candi Borobudur terbatas sementara target kunjungan wisatawan diharapkan naik. *Kedua* terkait dengan dampak pengelolaan pariwisata Candi Borobudur terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Terdapat potensi kontradiksi antara kepentingan pelestarian (konservasi) dan pemanfaatan (pariwisata) serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Ketiga adalah bagaimana pemerintah daerah di sekitar kawasan Borobudur menyikapi kebijakan pengembangan kawasan ini.

Jumlah wisatawan yang di Candi Borobudur saat ini melebihi batas kemampuan atau daya tampung candi. Berdasarkan kajian Balai Konservasi Borobudur (BKB) bahwa daya tampung Candi Borobudur hanya 123 orang sekali naik pada saat bersamaan, 528 orang di

pelataran, dan 10.308 orang di taman halaman, namun saat ini jumlah wisatawan yang naik jauh melebihi. Diungkapkan oleh Iskandar M Siregar (Kepala Saksi Konservasi BKB), "*carrying capacity* di Candi Borobudur sebanyak 123 orang dalam satu waktu. Sedangkan kapasitas ruang yang ideal untuk halaman candi sebanyak 528 orang dan di area taman sebanyak 10.308 orang" (Kompas.com, 11/07/2017). Terdapat indikasi kerusakan, terutama di bagian tangga mengalami keausan akibat aktivitas wisata. Di sisi lain BKB telah menargetkan bahwa Borobudur akan bertahan 1000 tahun lagi.

Menurut hasil kajian Yanuardi (2009), potensi kerusakan Candi Borobudur disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama* adalah kerusakan akibat faktor biotis dan abiotis. Faktor biotis karena adanya jasad makroskopis pada bebatuan, faktor abiotis terdiri dari air, suhu udara, kelembaban udara, penyi-naran, penguapan, dan polusi udara. *Kedua* adalah karena vandalisme, seperti corat-coret, goresan, pemindahan, perusakan, dan pencurian. Hal ini tentu menjadi persoalan ketika PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (pengelola wisata candi) yang bergerak di bidang pemanfaatan berkeinginan meningkatkan kunjungan wisata sesuai target pemerintah.

Terkait dengan dampak pengelolaan wisata, keberadaan wisata Borobudur dirasakan belum berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sekitar Candi Borobudur. Pengelolaan wisata candi belum melibatkan masyarakat atau berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Antara pengelolaan wisata (oleh PT Taman Wisata) dengan aktifitas masyarakat sekitar masih berjarak, masing-masing beralan sesuai kepentingannya. Masyarakat merasakan keberadaan wisata candi belum berdampak langsung pada pendaparan mereka.

Kebanyakan wisatawan hanya singgah sebentar di Candi Borobudur, kemudian kembali ke Yogyakarta. Belum banyak wisatawan berkunjung ke desa-desa sekitar dan menginap di wilayah Borobudur.

Isu lainnya adalah terpinggirkannya masyarakat sekitar dalam pemanfaatan Borobudur, sebagaimana dinyatakan Nagaoka (2011) dalam Kusno (2017):

“Fenomena yang terjadi di lokasi penelitian adalah terpinggirkannya masyarakat oleh desakan arus modal yang gencar menggerus dan menghanyutkan budaya setempat mengikuti arus baru yang masuk. Alasan utama yang diduga menjadi penyebab utama kondisi tersebut terbentuk adalah komersialisasi kawasan pariwisata”

Kusno (2017) dalam penelitiannya tentang nilai ruang dalam kawasan wisata Borobudur menyimpulkan bahwa ada 2 konsep nilai ruang, yaitu ruang kesenjangan, serta ruang keterlibatan dan keterbukaan. Ruang kesenjangan didukung oleh beberapa faktor yaitu; sikap apatis masyarakat (kekecewaan relokasi pada tahap pemugaran), tidak adanya konsep pemberdayaan masyarakat lokal dan perlindungan dari pemodal luar, rendahnya perhatian pemerintah terhadap kesenian lokal dan kurangnya sosialisasi tentang konsep pengembangan kawasan. Adapun ruang keterlibatan dan keterbukaan didukung oleh beberapa faktor yaitu ; potensi wisata yang menarik untuk dikemas, keinginan menikmati nilai ekonomi pariwisata Borobudur, pengelolaan pariwisata yang dilakukan secara mandiri.

Dengan demikian, dibalik adanya kekecewaan masyarakat di sekitar kawasan Borobudur, menyimpan potensi pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya pariwisata harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi (PDRB), ketersediaan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan

masyarakat dan pelestarian lingkungan merupakan salah satu pilar pariwisata yang berkelanjutan. Hasil studi UNESCO pada tahun 2012 menyebutkan bahwa 59 persen wisatawan hanya menghabiskan waktu 1-3 jam di Borobudur, hanya 2 persen yang berkunjung ke pedesaan sekitar, serta minimnya interaksi turis dengan penduduk sekitar (Bappeda Kabupaten Magelang, 2012).

Borobudur merupakan satu kawasan (landscap) yang berbagai pihak memiliki kepentingan didalamnya, yang tidak hanya dilihat sebagai warisan monumen atau bangunan semata, namun menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Pada tahun 1991 Borobudur ditetapkan sebagai warisan budaya dunia (World Heritage) oleh UNESCO. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pemanfaatan Borobudur untuk wisata juga seharusnya berorientasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan rencana pemerintah mengembangkan kawasan Borobudur, sangat penting dieprsiapkan sistem tata kelola wisata, dampak bagi perekonomian, sosial, dan lingkungan. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu mempersiapkan skema agar pengembangan kawasan Borobudur ini menghasilkan *multiplier effect* optimal yang positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar Borobudur perlu mempersiapkan strategi dan rencana tindak cepat yang yang sistematis dalam menghadapi tantangan tersebut.

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah konsep yang matang agar tidak terjadi kontradiksi yang kuat antara kepentingan peningkatan pariwisata, konservasi candi

Borobudur dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Penelitian ini memiliki tujuan menggali gagasan mengenai 1) bagaimana solusi pengelolaan KSPN Borobudur agar terjadi sisi kelestarian serta tercapai target kunjungan, 2) bagaimana peran yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah di sekitar Kawasan Borobudur untuk menyambut pengembangan kawasan Borobudur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (2002) penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya. Menurut Sugiyono (2009), metode penelitian kualitatif adalah penelitian dimana data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berpikir kritis ilmiah yaitu seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta dan fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan lapangan, kemudian menganalisis dan melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati (Bungin, 2008). Penelitian ini merupakan penelitian terapan, usaha menjawab masalah dengan tujuan praktis dan jelas (Daniel, dkk, 2005).

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dari para informan yang berasal dari pemangku kepentingan, yaitu aparat pemerintah kabupaten/kota serta pelaku wisata di sekitar kawasan wisata Borobudur. Data sekunder berasal dari dokumen terkait objek penelitian meliputi hasil penelitian, data statistik, dan dokumen kebijakan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penelusuran data, dan observasi. Instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini ialah panduan wawancara terbuka.

Teknik pengolahan dan analisis data kualitatif menggunakan model interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data secara simultan untuk menghasilkan kesimpulan yang saling terkait (Husaini dan Purnomo, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah

Candi Borobudur memiliki beragam nilai baik ekonomi, pendidikan, pusat agama, identitas budaya, identitas budaya bangsa, tempat rekreasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu keberadaannya melibatkan beragam kepentingan bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, berbagai pihak menaruh perhatian khusus kepada Candi Borobudur.

Pada tahun 1991 Borobudur ditetapkan sebagai warisan budaya dunia (World Heritage) oleh UNESCO. Kemudian Master plan untuk pelestarian Borobudur dirintis tahun 2007, dan direkomendasikan agar diciptakan *integrated management system* dalam pemanfaatan dan pelestariannya. Di tingkat nasional, Borobudur juga dilindungi dengan regulasi tentang Cagar Budaya yaitu Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Salahsatu point penting adalah bahwa pemanfaatan cagar budaya adalah untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, salahsatunya melalui kegiatan pariwisata. Dalam regulasi tersebut (pasal 97) juga disebutkan bahwa pengelolaan kawasan cagar budaya difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pengelolaan dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat, badan pengelola

tersebut dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya diterbitkan sebagai arahan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Borobudur dan sekitarnya. Kawasan Borobudur dibagi meliputi SP-1 berada dalam pengelolaan pemerintah pusat dengan radius 5 Km dari pusat Candi termasuk Palbapang dan kawasan candi meliputi Desa Borobudur dan Desa Wanurejo. Kawasan SP-2 berada diluar radius 5 Km dan berada dibawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai kawasan penyangga. Kawasan situs candi meliputi situs Candi Borobudur, situs Candi Pawon, dan situs Candi Mendut.

Di dalam Pasal 42 ditegaskan bahwa pengelolaan kawasan Borobudur dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, Bupati, dan badan/lembaga sesuai dengan kewenangannya. Adapun peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Borobudur adalah mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjamin pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia. Peruntukan dan penggunaan tanah dalam Kawasan Pariwisata Borobudur untuk keperluan bangunan, usaha, dan fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur harus sesuai dengan ketentuan regulasi ini.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. Badan ini dibentuk dengan tujuan optimalisasi pengelolaan, pengembangan,

dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur. Susunan Organisasi Badan Otorita Borobudur terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Borobudur, sesuai ketentuan tata ruang dalam Perpres 58 Tahun 2014. Pelayanan perizinan dan nonperizinan tersebut meliputi bidang: pekerjaan umum; perumahan dan kawasan pemukiman; ketenagakerjaan; lingkungan hidup; perhubungan; penanaman modal; perdagangan; pertanahan dan tata ruang; pariwisata; kehutanan; dan energi dan sumber daya mineral.

Badan Pelaksana memiliki hak untuk: a) merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah; b) menggunakan tanah Kawasan Pariwisata Borobudur untuk keperluan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur; dan c) menyewakan dan/atau mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak ketiga serta menerima uang pembayaran sewa dan/atau uang keuntungan hasil.

Dengan demikian, Badan Otorita Borobudur, terutama Badan Pelaksana akan melakukan kerja sebagian penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus di wilayah kawasan inti (SP1). Pengelolaan lingkungan dan kawasan, pemberian ijin, pemanfaatan dan pemeliharaan Candi dan kawasan inti berada dibawah kendali badan ini. Keberadaan badan otorita ini berkonsekuensi pada pengelolaan kawasan wisata secara umum.

Pada saat ini masih tahap persiapan dan transisi, tentu saja konsep pengelolaan yang akan dijalankan harus tetap mengedepankan sinergi antara pelestarian, pemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa proyek strategis juga sedang berjalan seperti New Yogyakarta

International Airport (NYIA) di Kulonprogo, Jalan Tol Bandara NYIA – Magelang – Semarang, dan reaktivasi rel kereta, yang tentu akan memberikan dampak pada masyarakat.

Model pemberdayaan masyarakat

Balai Konservasi Borobudur (BKB) sebagai pihak yang bertanggung-jawab dalam konservasi Candi Borobudur telah melibatkan masyarakat sekitar dalam konservasi. BKB telah melakukan berbagai kajian dengan tema terkait upaya pelestarian Borobudur dengan melibatkan masyarakat, serta melakukan upaya pemeliharaan/pelestarian Candi Borobudur berkelanjutan dengan melibatkan tenaga lokal sebagai tenaga terampil. Tenaga-tenaga terampil yang menjadi tulang-punggung pemelihara Candi Borobudur adalah warga-warga lokal yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan khusus.

Dari aspek pemanfaatan, pengelolaan wisata Candi Borobudur dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Taman Wisata Candi. Adapun masyarakat terlibat di dalam aktifitas wisata untuk sektor informal seperti pedagang asongan dan jasa lainnya. Borobudur sebagai aset wisata, memiliki nilai yang cukup kuat, mampu berperan sebagai salah satu objek dan tujuan wisata lokal maupun internasional, mampu menjadi ikon pariwisata, dan hal ini tidak terlepas dari media-media yang berperan sebagai *brand* yang membentuk, membangun, dan mencipta identitas pada suatu entitas pariwisata (Islam, 2013). Keberadaan wisata Borobudur juga turut menciptakan perubahan pola penghasilan masyarakat sekitar. Penduduk yang sebelumnya hanya mengandalkan pertanian, memiliki kesempatan untuk terlibat dalam usaha jasa wisata, pedagang asongan, maupun kios dan sarana lainnya. Pada awalnya keberadaan wisata Candi

Borobudur yang dikelola oleh PT Taman Wisata Candi memberikan pengaruh pendapatan tambahan bagi masyarakat (Wiratmoko, 2012). Perkembangan selanjutnya banyak masyarakat dari luar kawasan Borobudur yang juga ikut terlibat baik sebagai pedagang asongan, atau membuka kios, bahkan peminta-minta. Sempat tersebar kabar terkait kerawanan di kawasan Borobudur seperti penodongan atau pedagang yang memaksa pengunjung (Wiratmoko, 2012).

Objek wisata ini menjadi salahsatu andalan pariwisata Indonesia untuk menarik minat wisatawan asing. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Borobudur mayoritas dari Eropa 56 persen, Amerika 16 persen, dominan usia muda antara 19 – 29 tahun, berpendidikan tinggi, mayoritas buka pengunjung berulang atau hanya sekali saja, rata-rata kunjungan 2,84 hari yang masuk kategori rendah (Diarta, 2016).

Menurut laporan UNESCO (Zako, 2017), bahwa sekitar 59 persen wisatawan hanya berkunjung selama 1-3 jam di candi, dan hanya 2 persen yang berkeliling di pedesaan sekitar Borobudur. Dengan demikian, interaksi antara wisatawan dan penduduk sekitar juga minim. Beberapa kondisi seperti ketidaknyamanan, pedagang asongan yang menjual barang berkualitas rendah, menimbulkan *image* negatif terhadap Borobudur secara umum, sehingga menurunkan minat wisatawan mengeksplorasi kawasan Borobudur. Di sisi lain pemerintah memiliki agenda pengembangan kawasan Borobudur sebagai salahsatu “Bali baru”. Oleh sebab itu perlu beberapa perbaikan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pengembangan kawasan Borobudur memiliki potensi kontradiksi antara pelestarian dan pemanfaatan, serta masalah kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena pemaknaan terhadap Candi Borobudur yang

cenderung sempit. Kawasan Candi Borobudur cenderung dianggap berbentuk fisik monumen atau bangunan, tanpa mempertimbangkan hubungan dengan *landscape* (lingkungan) sekitarnya. Candi Borobudur dianggap sebagai entitas yang mandiri berdiri sendiri dan tidak terkait dengan lingkungan sekitar, termasuk masyarakat dan budayanya. Akibatnya aktivitas wisata hanya terpusat pada candi sebagai monumen fisik.

Hal inilah yang menyebabkan kunjungan wisatawan hanya terpusat di candi saja. Begitu pula manfaat ekonomi juga hanya dirasakan oleh pengelola wisata candi dan penyedia jasa di sekitarnya. Candi sebagai satu-satunya pusat wisata tersebut pada akhirnya memberikan beban besar, karena semua aktivitas wisata hanya bertumpu pada bangunan candi semata. Jika hal ini terus terjadi, maka kontradiksi antara pelestarian dan pemanfaatan untuk menghasilkan uang akan terus menguat. Di sisi lain pemerintah menargetkan kunjungan 2 juta wisatawan asing dan 11 juta wisatawan domestik, di sisi lain daya dukung candi sangat terbatas, ditambah kerusakan candi, keausan bebatuan, aksi vandalisme dan sejenisnya terus terjadi. Selain masalah teknis di atas, dari aspek manajerial kawasan Borobudur juga belum terdapat sinergi antar stakeholder. Masing-masing memiliki agenda sendiri di dalam mengembangkan konsep wisata Borobudur.

Oleh karena itu, perlu adanya paradigma baru dalam pengelolaan wisata Borobudur dimana mulai bergeser dari berpusat pada monumen fisik candi menuju pada konsep Borobudur sebagai kawasan *landscape* yang meliputi lingkungan, masyarakat dan budayanya. Perlu adanya perubahan makna kawasan Borobudur yang tidak saja terkait bangunan fisik candi tetapi juga lingkungan masyarakat dan budayanya.

Candi Borobudur tidak lagi dimaknai situs atau bangunan yang terpisah dari pembangunan dan terisolasi dari perubahan yang terjadi, serta masyarakatnya. Upaya pelestarian dan pemanfaatan sangat terkait dengan isu-isu sosial, ekonomi, serta budaya di sekitarnya. Selama ini pemanfaatan Borobudur sebagai wisata hanya melibatkan pihak tertentu (PT TWC), kedepan perlu upaya memperluas cakupan dengan menempatkan lebih banyak aktor kepentingan dalam pengelolaannya.

Maka, salahsatu upaya yang perlu dilakukan adalah pengelolaan dengan pendekatan partisipatif, dimana mengutamakan keterlibatan masyarakat sekitar agar memiliki peran lebih besar, kepedulian, serta manfaat bagi kehidupan mereka. Candi Borobudur merupakan milik bersama, dimana banyak kepentingan terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, konsep yang ditawarkan haruslah utuh, Borobudur sebagai sebuah *landscape*.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi hasil pertemuan *6th International Experts Meeting on Borobudur 2013* (BKB, 2013) bahwa Borobudur harus dipandang sebagai sebuah *landscape* dimana masyarakat masuk di dalamnya, masyarakat dengan budayanya sebagai bagian warisan dunia. Pariwisata di kawasan Borobudur juga harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dimana pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan menjadi salah satu pilar pariwisata yang berkelanjutan. Rekomendasi lainnya adalah memperluas kegiatan wisata, tidak hanya berpusat pada Candi Borobudur, namun menciptakan objek dan atraksi lain di sekitarnya, antara lain dengan mengembangkan wisata pedesaan sekitar Borobudur. Hal ini juga memiliki tujuan memperpanjang lama tinggal di Borobudur dengan mengoptimalkan kawasan wisata pedesaan.

Oleh sebab itu, pengembangan kawasan Borobudur perlu dibarengi dengan upaya mengubah *mindset* wisatawan bahwa berwisata Borobudur adalah berkunjung ke Kawasan Borobudur secara keseluruhan, bukan hanya ke candi, namun ke lingkungan sekitar. Langkah ini perlu dibarengi dengan penyiapan masyarakat dan lingkungan sekitar agar siap menjadi atraksi wisata yang menarik dan bernilai. Dengan demikian, kontradiksi antara kelestarian dan pemanfaatan bisa diminimalisir melalui perluasan destinasi wisata. Wisata Borobudur adalah berorientasi pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan dan mengelola destinasi wisata mereka sendiri.

Pada saat ini memang telah tumbuh kesadaran masyarakat sekitar di beberapa desa untuk merubah *mindset* wisata Borobudur. Mereka telah melakukan berbagai upaya, terutama menjadikan desa mereka sebagai desa wisata, mendirikan beberapa galeri dan objek seni budaya. Desa wisata tersebut sebagai sebuah upaya agar masyarakat terlibat dan mendapatkan manfaat dari kegiatan wisata kawasan Borobudur. Mereka juga telah berupaya melakukan eksplorasi terhadap lingkungan alam, seni, budaya dan berbagai produk sebagai atraksi wisata berbasis pedesaan. Wisata-wisata tersebut juga menyediakan berbagai paket wisata seperti jelajah desa, *outbond* atau pentas seni. Sebagai desa yang berada di lereng menoreh juga mengeksplorasi potensi *landscape* perbukitan sebagai destinasi wisata. Konsep wisata desa tersebut menjadikan Candi Borobudur sebagai magnet atau ikon wisata, namun atraksi utama wisata justru berada di sekitar Borobudur.

Pengelola wisata di desa-desa sekitar Borobudur sebagian besar dikelola oleh masyarakat, terutama berbentuk kelompok masyarakat, atau kelompok sadar wisata. Pemerintah desa berperan

sebagai fasilitator dan koordinator, namun seringkali masyarakat atau kelompok tersebut bergerak sendiri. Beberapa tahun terakhir, pelaku-pelaku wisata desa di sekitar Borobudur telah berupaya membangun jejaring kerjasama melalui Klaster Pariwisata Borobudur. Mereka menawarkan paket wisata jelajah desa-desa sekitar Borobudur memanfaatkan kendaraan tradisional (kereta kuda), dan singgah di beberapa tempat seperti sentra kerajinan, *galery*, kuliner, dan UMKM.

Akan tetapi usaha tersebut masih terkendala minimnya sinergi baik diantara masyarakat sendiri maupun dengan PT Taman Wisata Candi. Peran pemerintah daerah juga dirasakan masih kurang optimal di dalam pengembangan desa wisata tersebut. Disamping masalah tersebut, di dalam perbaikan pengelolaan kawasan Borobudur terdapat beberapa potensi, baik bersumber dari masyarakat, pemerintah, bahkan lembaga asing.

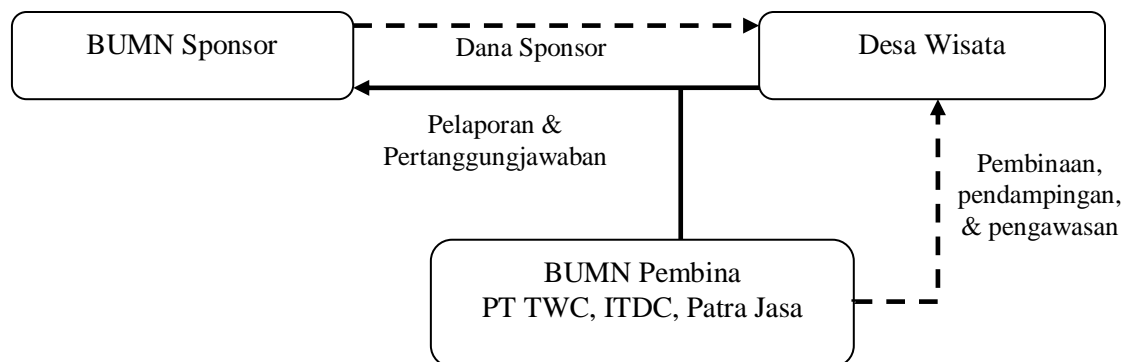
PT. Taman Wisata Candi (TWC) sebagai BUMN pengelola wisata candi juga mulai berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar agar mendapatkan manfaat dari kegiatan wisata Candi Borobudur. Konsep yang dikembangkan adalah *Community Based Tourism* (CBT), yang berorientasi pembangunan masyarakat lokal dan konservasi lingkungan melalui pengelolaan potensi ekonomi, warisan budaya dan tradisi serta ekowisata (ecotourism) dengan mengutamakan peran aktif masyarakat lokal dan pengunjung secara berkelanjutan. Harapan konsep ini mampu mendorong ekonomi berkelanjutan warga sekitar Borobudur dalam *Interconnecting Tourism System* berbasis komunitas. Konsep tersebut diwujudkan dengan pengembangan desa wisata di sekitar Borobudur.

Menurut konsep PT TWC (2017), “desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah

tujuan wisata, dimana penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli, komponen utama dalam desa wisata adalah akomodasi dan atraksi”.program ini diawali dengan mengidentifikasi dan menggali potensi, menghidupkan potensi dan menyajikannya sebagai atraksi wisata. Kemiteraan antara PT TWC dengan masyarakat desa dilakukan melalui jalur formal, yaitu pemerintah desa, kemudian pemerintah desa mengkoordinis masyarakatnya.

PT TWC mendapatkan mandat dari Kementerian BUMN menggandeng 20 BUMN untuk memberikan dukungan desa di sekitar Borobudur, setiap BUMN mendanai 1 desa dalam pengembangan wisata desa. Desa memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan dana kepada

BUMN sponsor. Adapun 3 BUMN berperan sebagai pembina, yaitu PT TWC, PT Patra Jasa, dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang bertugas memberikan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pengembangan desa wisata. Target di setiap desa terbangun fasilitas Balai Ekonomi Desa (Balkondes) beserta pendukung seperti *homestay*, workshop. Agenda ini diharapkan dapat meningkatkan wisata desa di sekitar Borobudur dengan konsep *village tour*, serta memperlama masa tinggal wisatawan di kawasan Borobudur. Konsep kemiteraan antara BUMN-BUMN tersebut dengan masyarakat, dalam hal ini diwakili pemerintah desa, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1

Skema pendanaan dan pendampingan desa wisata kawasan Borobudur

Sumber: PT TWC, 2017

Dari 20 desa di Kecamatan Borobudur, sebagian besar telah difasilitasi terutama untuk pembangunan Balkondes, *homestay*, dan workshop, sebagian masih dalam proses. Masing-

masing desa juga telah diidentifikasi potensinya, sebagai pedoman di dalam pengembangan desa wisata.

Tabel 1.
Potensi Desa Wisata di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang

No	Nama Desa	Potensi
1	Borobudur	Candi Borobudur, Waroeng Kopi Borobudur
2	Wanurejo	Candi Pawon
3	Wringinputih	Hutan Bambu
4	Karangrejo	Punthuk Setumbu, Bukit Baredo
5	Karanganyar	Gerabah tradisional
6	Kembanglimus	Gereja Ayam, Bukit Purwosari
7	Ngadiharjo	Punthuk Ki Bomosekti
8	Giritengah	Punthuk Sukmo Joyo, kambing Etawa
9	Candirejo	Omah pring (rumah adat)
10	Tuksongo	Kerajinan topeng
11	Tegalarum	Pembibitan tanaman
12	Giripurno	Mata air Sileng
13	Kebonsari	Kerajinan bambu
14	Majaksingi	Kebun kopi
15	Kenalan	Kerajinan anyaman pandan, Gunung Gondopurawangi
16	Bigaran	Kakao, cengkeh
17	Sambeng	Tikar pandan
18	Ngargogondo	Desa Bahasa
19	Bumiharjo	Rebana
20	Tanjungari	Kerajinan abu vulkanik, home industri tahu

Sumber: PT TWC, 2017

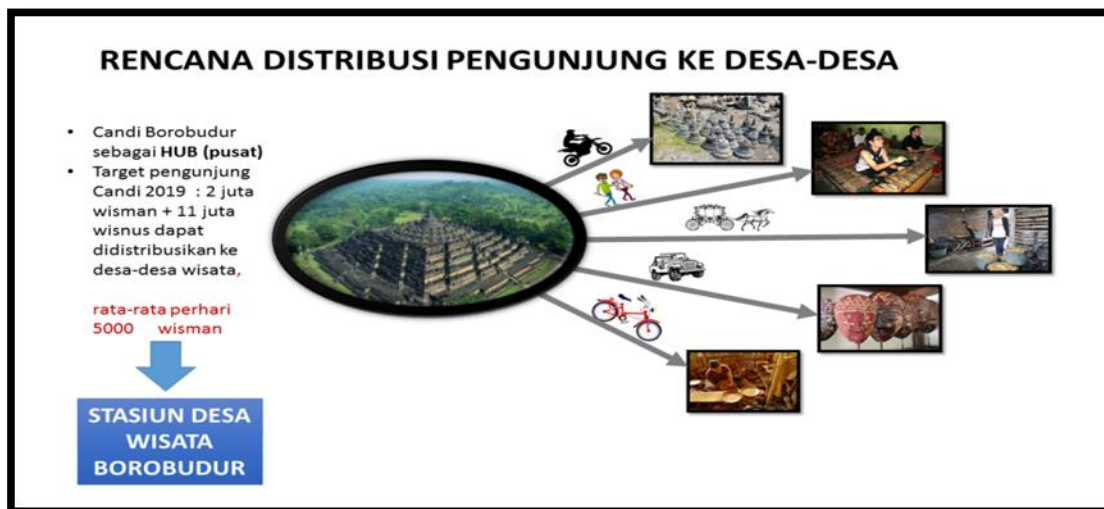
Output utama dari konsep desa wisata tersebut adalah terdistribusinya wisatawan ke desa-desa, sinergi BUMN dan masyarakat, meningkatnya kapasitas masyarakat, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan secara fisik terbangunnya Balkondes dan *homestay*. Balkondes adalah sentral pelayanan wisata dasar (kuliner dan *hospitality*), didukung keberadaan *Homestay* agar wisatawan bisa tinggal bersama penduduk dan berbaur dengan masyarakat. Balkondes dibangun di atas tanah desa, dengan dana BUMN yang ditunjuk sebagai sponsor, serta dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fasilitas ini berisi galeri, ruang pertunjukan, dan workshop sebagai *center point* wisata desa. Dari 20 desa yang ditargetkan, pada tahun 2017 sudah terealisasi 16 Balkondes, namun tercatat

hanya 4 Balkondes yang aktif. Pembangunan *homestay* dilakukan di tanah warga, dengan dana dari BUMN sponsor yang ditunjuk, kemudian pengelolaan akan dilakukan oleh Hotel Manohara, dan dalam pemasaran dilakukan oleh Hotel Indonesia Group. Selain itu, di banyak Balkondes, selain terdapat *galery*, pertunjukan dan workshop, juga dibangun *homestay* yang menjadi bagian dari fasilitas Balkondes. Harapan dengan adanya Balkondes dan *homestay* ini dapat memperpanjang masa tinggal/*length of stay* wisatawan melalui adanya atraksi baru, mendiptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Konsep desa wisata tersebut menurut PT TWC sebagai solusi antara keinginan mencapai target kunjungan 2

juta wisatawan mancanegara di tahun 2019 yang jika dihitung rata-rata per hari di atas 5.000 orang dengan keharusan melakukan konservasi (daya tampung

candi). Konsep manajemen wisata terkoneksi antara candi dan desa, maka akan terjadi distribusi wisatawan.



Gambar 2
Konsep distribusi wisatawan di kawasan Borobudur
Sumber: PT TWC, 2017

Wisata keliling desa-desa di kawasan Borobudur sudah mulai berjalan, misalnya menggunakan delman, mobil, dan sepeda. Namun belum didapat angka pasti berapa banyak wisatawan yang berkunjung ke desa-desa tersebut. Perkembangan saat ini masih perlu dilakukan evaluasi terkait dengan efektifitas konsep *Balkondes* dan *homestay* tersebut. Pertama adalah konsep mengenai wisata desa yang berpusat di *Balkondes*, yang berisi *workshop*, *gallery*, kuliner dengan dukungan *homestay* mampu menarik wisatawan. Bagaimanakah interkoneksi antara candi dengan desa. Saat ini sebagian besar masih dalam tahap pembangunan, dan tingkat kunjungan wisatawan juga belum tumbuh sesuai harapan.

Selain PT TWC dan BUMN lainnya, UNESCO juga melakukan beberapa upaya untuk memberdayakan masyarakat di sekitar Borobudur. Menurut kajian UNESCO (Zako, 2017) selama ini

masyarakat lokal tidak selalu mendapatkan manfaat dari aset ekonomi dari Borobudur. Pada 2013-2014 UNESCO melakukan penilaian tentang potensi daerah Borobudur, pemetaan budaya berbasis masyarakat, dan survei dasar terhadap pelaku seni yang melibatkan 20 Desa di Kecamatan Borobudur dan lebih dari 150 orang. Hasilnya rekomendasi berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk eksplorasi seni budaya dalam rangka memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

UNESCO melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat pada 8 desa di sekitar Candi Borobudur dan Prambanan. Kelompok perempuan dan pemuda menjadi sasaran kegiatan ini. Mereka didorong untuk menciptakan produk yang inovatif berbasis budaya dan kreativitas. Ada 7 jenis kreativitas yang dikembangkan yaitu batik, jumpitan (*tie-dye*), keramik, tur berbasis masyarakat, pertunjukan tradisional, makanan

tradisional, dan galeri komunitas. Kegiatan ini juga melibatkan peran serta pemerintah daerah dan sektor swasta dalam rangka keberlanjutan Galeri Komunitas. Sebanyak 95 pemuda di Borobudur telah mendapatkan pelatihan tentang pengembangan industri kreatif “*General Creative Industries*” yang seperti kuliner, fashion/busana, kerajinan keramik, dan sebagainya.

Persiapan Pemerintah Daerah

Di sekitar kawasan Borobudur terdapat beberapa daerah penyangga, yaitu Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sleman (DIY). Di dalam penelitian ini dibahas tentang penyikapan 3 daerah inti yang terkait, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kota Magelang. Ketiga daerah tersebut terdampak secara langsung dengan pengembangan kawasan Borobudur, baik dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan wisata dan dampaknya. Sebagai kawasan penyangga Borobudur, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Purworejo selayaknya berbenah dengan berbagai program pembangunan pendukung dalam rangka meningkatkan percepatan daya saing daerah dan menangkap peluang pengembangan ekonomi untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam konsep pengembangan pariwisata memiliki 4 klaster wisata: yaitu Merapi, Merbabu, Sumbing dan Borobudur. Dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang menjadikan Borobudur sebagai salahsatu tumpuan pariwisata, meskipun dikelola oleh BUMN (PT TWC). Meskipun candi berada di wilayahnya, namun Pemerintah Kabupaten Magelang tidak memperoleh akses langsung dalam pengelolaan Borobudur karena sudah

dikelola Pemerintah Pusat. Saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang tidak mendapatkan bagi hasil secara langsung dari perolehan tiket yang dikelola PT Taman Wisata Candi. Oleh sebab itu, perlu pengembangan konsep wisata baru agar masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan hasil dari keberadaan Candi Borobudur.

Terkait dengan pendirian BOP, masih terdapat beberapa pertanyaan tentang keterlibatan Pemerintah Kabupaten Magelang, serta bagaimana pemilahan kewenangan dalam pengelolaan kawasan sekitar Borobudur dengan BOP. Begitu juga dengan rencana Bandara NYIA, Pemerintah Kabupaten Magelang juga harus memikirkan solusi agar pembangunan infrastruktur transportasi menuju Borobudur dapat meningkatkan potensi ekonomi di sekitar jalur tersebut. Pemerintah Kabupaten Magelang lebih memilih jalur konvensional agar membuka akses desa-desa sekitar, terutama daerah di sekitar Bukit Menoreh yang selama ini relatif terisolir, padahal berada di dekat Borobudur.

Sebagaimana disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Magelang (dalam forum *pra expert meeting* Borobudur, 2017) terkait pengembangan kawasan Borobudur, Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki konsep kewilayahan berupa segitiga kecil dan segitiga besar. Konsep segitiga kecil terdiri dari kawasan pusat Borobudur dengan radius 1 Km, dan konsep segitiga besar berupa kawasan Borobudur sampai Palbapang (radius 5 Km).

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Magelang akan fokus pada pengembangan wisata pendukung disekitar Borobudur, memperkuat desa-desa wisata di sekitar Borobudur, bekerjasama dengan agen travel domestik dan luar negeri, mempersiapkan paket-paket wisata dan mengenalkan potensi

alam dan budaya desa wisata serta menyediakan infrastruktur pendukung (penginapan/homestay, transportasi, dll) sehingga dapat menambah lama tinggal wisatawan. Beberapa desa di Kecamatan Borobudur telah menjadi desa wisata seperti Candirejo, Borobudur, Wanurejo, Podorejo, Karangrejo. Ada banyak potensi wisata pedesaan, alam, seni dan budaya serta produk kreatif yang bisa menjadi objek wisata pendukung. Upaya kedepan, Pemerintah Kabupaten Magelang akan mendorong peningkatan desa wisata, memperkuat pengelolaan wisata dan pendukungnya seperti *homestay*, *galery*, transportasi, dan pendukung wisata lainnya.

Salah satu kawasan yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Magelang adalah kawasan Menoreh yang berada di dekat Borobudur tetapi belum memperoleh manfaat, bahkan kondisi infrastruktur sangat kontras dengan daerah lainnya. Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki agenda “Bedah Menoreh” dalam rangka meningkatkan kawasan menoreh. Pembangunan Bandara NYIA juga menjadi salahsatu peluang menghidupkan kawasan Menoreh. Dengan pengembangan jalur jalan konvensional yang menembus Menoreh menuju bandara diharapkan akan membangkitkan kawasan ini. Beberapa objek lain di sekitar Menoreh adalah objek alam seperti bukit marmer, hanya saja terkendala kegiatan penambangan yang saat ini sedang mengajukan perpanjangan ijin (PT Margola sejak 1990-an)

Pengembangan kawasan perbukitan Menoreh diawali dengan melakukan kajian (Fisibility Study) Bedah Menoreh berupa pembukaan jalan di Kawasan Menoreh, dan identifikasi sosial ekonomi Kawasan Perdesaan Perbukitan Menoreh yang dilaksanakan tahun 2016. Saat ini juga sedang melakukan kajian identifikasi sosial ekonomi Kawasan Perdesaan Perbukitan Menoreh. Hasil Pra Studi

Kelayakan Bedah Menoreh Tahun 2016 adalah perlu diadakan pelatihan-pelatihan untuk penguatan dan peningkatan kemampuan dan kreatifitas masyarakat baik dalam bentuk pelatihan untuk peningkatan hasil pertanian, kualitas hasil industri, manajemen internal dan manajemen pemasaran hasil industri, maupun pelatihan pengemasan hasil industri sehingga berstandar internasional, diadakan pelatihan-pelatihan untuk penguatan dan peningkatan kemampuan masyarakat umum berupa pelatihan bahasa asing dan kemampuan bernegosiasi, pembuatan rencana rinci terkait kawasan yang berkembang di tepi jalan utama, implementasi, pengawasan, pengendalian dan penerapan sanksi atas pelaksanaan rencana tata ruang beserta KDB, KLB dan KDH. Hasil rekomendasi Pra Studi Kelayakan Bedah Menoreh juga menyebutkan bahwa terdapat 6 jalur yang dapat dikembangkan yaitu desa Ngargoretno, Giripurno, Kalisalak, Sriwedari, Margoyoso, Margoyoso, dan Menoreh.

Kabupaten Purworejo merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulonprogo (DIY). Dalam konteks pengembangan kawasan Borobudur, keterlibatan Kabupaten Purworejo cukup penting, dimana Badan Otorita Borobudur berada di Kabupaten Purworejo, serta keberadaan bandara NYIA berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo.

Landasan pacu bandara NYIA tepat berada diperbatasan Kabupaten Purworejo. Dampak yang akan dialami Kabupaten Purworejo meliputi 2 fase yaitu konstruksi dan pasca konstruksi. Dalam fase konstruksi terdapat kebutuhan bahan galian (urukan), pengambilan material galian C, berasal dari Purworejo namun sebagian besar tak berijin serta adanya arus lalu lintas melewati Purworejo. Selain itu, pelibatan tenaga kerja dari Purworejo

masih sangat minim, tidak mengambil pekerja dari Purworejo.

Pada tahap pasca konstruksi, penyediaan sumberdaya manusia yang berkualitas terutama dengan spesialisasi penerbangan juga harus dipikirkan untuk mendukung pengembangan Bandara NYIA. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Purworejo mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendirikan SMK Penerbangan di Purworejo. Dampak lain juga terkait pemenuhan kebutuhan sumber air NYIA yang akan memanfaatkan Bendung Bener, padahal peruntukan air di bendung tersebut untuk mengairi lahan pertanian/sawah sekitar 5.000 hektar. Pada saat operasional bandara, terdapat 3 desa yang berada di jalur lintasan pesawat sehingga terdampak polusi suara/kebisingan, pembatasan pembangunan infrastruktur (pembatasan ketinggian bangunan), dan penataan lampu sehingga tidak mengganggu lalu lintas penerbangan.

Di luar persoalan konstruksi dan operasionalisasi bandara NYIA tersebut, Kabupaten Purworejo melakukan beberapa persiapan. Keberadaan bandara NYIA sebagai akses wisatawan mancanegara maupun domestik ke Borobudur, tentu akan melewati Kabupaten Purworejo. Dengan demikian, beberapa upaya harus dilakukan agar masyarakat Purworejo mendapatkan manfaat langsung dari adanya jalur tersebut. Konsep kebijakan yang diusung Kabupaten Purworejo adalah konsep *Border City* dan *Heritage City*.

Konsep *Border City* merupakan pengembangan kawasan produktif baru di sekitar perbatasan dengan DIY, yaitu dekat dengan bandara NYIA. Lokasi ini berada di sebelah timur pusat pemerintahan Kabupaten Purworejo. Kawasan ini akan dikembangkan sebagai kawasan industri dan jasa yang

memanfaatkan aksesibilitas dan mobilitas dengan adanya bandara NYIA.

Adapun konsep *Heritage City* berupaya mempertahankan *landscape* kawasan pusat kota Puroworejo yang memiliki nilai sejarah. *Landscape* pusat kota atau pusat pemerintahan Kabupaten Purworejo merupakan aset sejarah dan budaya yang merepresentasikan nilai-nilai karakter peradaban dan pusat pemerintahan di masa kolonial, dimana terdapat bangunan bersejarah, yang salah satunya adalah rencana tempat pelarian Ratu Belanda pada saat terjadi perang di Eropa. Pusat kota akan tetap dipertahankan keberadaannya, tidak akan dilakukan perubahan dan pembangunan, namun pemeliharaan untuk menjaga wajah kota sebagai sebuah aset sejarah dan budaya yang bernilai tinggi. Hal ini sejalan dengan konsep *Border City* dimana pembangunan akan dipusatkan di wilayah timur, bukan di pusat kota.

Terkait dengan konsep *Heritage City*, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum berupa fasilitasi *Detail Engineering Design* (DED) dan *Masterplan* Rencana Aksi Daerah Kota Pusaka yang berpusat di alun-alun – Stasiun Purworejo - SMP 1 Purworejo, dan Kodam.

Pemerintah Kabupaten Puroworejo merancang kerjasama dengan PT. KAI untuk mengoptimalkan aset-asetnya di pusat kota. Salahsatunya adalah optimalisasi stasiun Purworejo sebagai wahana *event* atau pameran, pentas seni, serta mendirikan pusat oleh-oleh khas Jawa Tengah berlokasi di bekas lahan pasar yang juga milik PT KAI. Dalam mengelola aset ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo memberdayakan pelaku ekonomi kecil (UMKM) untuk mengisi produknya, baik *souvenir*, kuliner dan jajan/oleh-oleh khas Jawa Tengah dengan menggunakan pola kerjasama. Pada saat

ini Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah mengirimkan surat penyusunan *masterplan* kepada PT KAI dan sudah ada pembicaraan awal.

Dalam pengembangan akses transportasi, Pemerintah Kabupaten Purworejo juga sudah mengusulkan aktivasi Stasiun Kwojo sebagai akses menuju bandara melalui jalur kereta api. Aktivasi jalur kereta api sebagai akses transportasi wisata ini juga penting bagi dinamisasi perekonomian Kabupaten Purworejo.

Kota Magelang merupakan kawasan penyangga wisata kawasan Borobudur, lebih berorientasi kepada penyediaan sarpras dan akomodasi, serta wisata berbasis sejarah dan budaya. Kota Magelang menyediakan jasa akomodasi seperti hotel, kuliner, dan perbelanjaan. Selain itu Kota Magelang juga memiliki berbagai potensi wisata untuk dikembangkan, diantaranya wisata sejarah (Museum BPK, Museum Diponegoro, Patung Sudirman, Legenda Gunung Tidar Pakuning Tanah Jawi dll), wisata religi (ziarah makam Syech Subachir), wisata alam (Gunung Tidar, rafting Sungai Luk Ulo dll), wahana wisata buatan (Taman Kyai Langgeng, tanaman langka), wisata kuliner, dan wisata perkampungan (kota).

Kota Magelang menawarkan layanan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/ Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran), yang didukung dengan adanya hotel dan gedung pertemuan. Berbagai *event* atau kegiatan seni budaya, olahraga, dan akademik kerap diadakan di Magelang baik skala lokal, regional dan nasional. Pertemuan ilmiah dan bisnis juga kerap dilakukan di Kota Magelang. Dari berbagai acara tersebut, salah satunya yang terkait adalah kegiatan *field trip* atau kunjungan lapangan dengan lokasi sentra UMKM, kampung maupun museum di Kota Magelang, serta kawasan Borobudur.

Dengan demikian Kota Magelang sebagai kota MICE memiliki jaringan keterkaitan dengan wisata kawasan Borobudur.

Sebagai bagian dari kawasan Borobudur dalam arti luas, Pemerintah Kota Magelang telah berupaya melakukan beberapa penataan pariwisata. Beberapa atraksi wisata unggulan seperti aktivitas produktif dan kreatif masyarakat, diantaranya kampung organik, Kampung Tidar Campur (teknologi pengolahan sampah), sentra UMKM tahu, bank sampah, kampung warna/pelangi, industri makanan ringan/snack, pembuatan Alat Peraga Edukasi (APE), permainan anak, dan sebagainya, selain sebagai wisata edukasi juga lokasi studi banding.

Kota Magelang juga memiliki konsep *Smart City* dengan pengembangan kota berbasis IT, diantaranya penyiapan sarana prasarana fiber optik, *e-government*, rencana e-pelayanan publik. Dilaksanakan juga program kota bersih indah dengan slogan “kota sejuta bunga” melalui penanaman bunga *tabebuaya* sepanjang ruas perkotaan, penataan alun-alun kota, dan penataan PKL. Namun demikian, secara khusus Kota Magelang belum mempersiapkan perencanaan terkait antisipasi dampak proyek strategis nasional kawasan Borobudur.

Berdasarkan pemaparan di atas, pemerintah daerah di kawasan Borobudur sudah memiliki posisi strategis masing-masing yang harus dioptimalkan. Kabupaten Magelang sebagai pusat kawasan harus mengembangkan potensi *landscape* berupa lingkungan pedesaan, beserta masyarakat, seni, budaya dan kehidupan keseharian. Desa wisata perlu mendapatkan dukungan penuh baik dari aspek kapasitas SDM, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Kabupaten Purworejo merupakan kawasan perlintasan, sekaligus memiliki potensi alam, budaya dan sejarah. Akses transportasi yang semakin mudah harus

dimanfaatkan dalam rangka pengembangan wilayah sebagai pendukung kegiatan wisata. Wilayah ini berperan sebagai wilayah perantara atau persinggahan yang menyediakan layanan pendukung wisata dengan potensi UMKM yang sekaligus menawarkan wisata alternatif atau tambahan bagi kawasan Borobudur. Kota Magelang sebagai penyangga kawasan Borobudur menyediakan berbagai akomodasi wisata dan kegiatan terkait dengan itu. Banyaknya hotel, tempat perbelanjaan, kuliner, sarana transportasi, wisata budaya dan perkotaan, serta jasa lainnya menjadikan Kota Magelang memiliki potensi kuat sebagai penyangga kawasan Borobudur. Diantara ketiga daerah tersebut bisa saling berbagi peran sesuai dengan posisinya. Kabupaten Magelang sebagai pusat kawasan mengembangkan desa wisata, Kabupaten Purworejo sebagai daerah persinggahan mampu menyediakan atraksi alternatif, dan Kota Magelang sebagai penyangga mampu menyediakan akomodasi penunjang wisata.

KESIMPULAN

Solusi pengelolaan kawasan wisata Borobudur terkait keseimbangan antara konservasi dengan target capaian kunjungan wisata ialah dengan mengubah *mindset* wisata tidak lagi berpusat pada Candi Borobudur semata, tetapi pariwisata berbasis *landscape* budaya dan masyarakat, dimana Borobudur menjadi salahsatu bagiannya. Paradigma wisata bergeser dari *monument-centric* ke kawasan lebih luas dan tidak lagi terpusat, tetapi pelibatan aktif masyarakat. Pariwisata harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan Pemberdayaan masyarakat sekitar sekaligus pelestarian

lingkungan sebagai salah satu pilar pariwisata yang berkelanjutan. Peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah di sekitar kawasan Borobudur (Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo) adalah berbenah dengan berbagai program pembangunan pendukung dalam rangka meningkatkan percepatan daya saing daerah dan menangkap peluang pengembangan ekonomi untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Perlunya forum kesepakatan untuk membagi peran masing-masing daerah dalam menyikapi KSN Borobudur. Kabupaten Magelang sebagai pusat kawasan mengembangkan desa wisata, Kabupaten Purworejo sebagai daerah persinggahan mampu menyediakan atraksi alternatif, dan Kota Magelang sebagai penyangga mampu menyediakan akomodasi penunjang wisata.

SARAN

1. Pengelolaan kawasan Borobudur harus menampung kepentingan Konservasi, Pemanfaatan, dan Kesejahteraan masyarakat
2. Pengelolaan wisata tidak sekedar mengejar jumlah uang yang masuk tetapi menyediakan ruang publik untuk partisipasi masyarakat sekitar
3. Perlunya forum komunikasi dan sinergi program kawasan Borobudur antara stakeholder pusat dan daerah, pemerintah dan masyarakat, pengelola kawasan, serta lembaga non pemerintah, sebagai forum kesepakatan untuk membagi peran masing-masing daerah dalam menyikapi pengembangan KSN Borobudur, ditindaklanjuti dengan MuO

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappeda Kabupaten Magelang. 2012. *Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Magelang*, Bahan Paparan.
- _____. 2017. Program-Program Pemerintah Kabupaten Magelang Untuk Menunjang Pelestarian Candi Borobudur, Disampaikan dalam Seminar *Pra Expert Meeting*, Magelang, 3 Oktober 2017
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi. Ekonomi. Kebijakan Publik. dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Prenada Media Group
- Daniel, Moehar, Darmawati, Nieldalina. 2005. *PRA, Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*. Jakarta. Bumi Aksara
- Diarta, I Ketut Surya. 2016. Strategi Promosi Situs Warisan Budaya Dunia Borobudur Untuk Wisatawan Mancanegara. Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2016 "Inovasi Humaniora, Sains dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan. LPPM Udayana . 15-16 Desember 2016
- Islam, Muh Ariffudin. 2013. *Peran Brand Borobudur Dalam Pariwisata dan World Heritage*. Jurnal Dewa Ruci Vol. 8 No. 3, Desember 2013. Hal 377 – 392
- Kompas.com. "Cegah Kerusakan, Sebetulnya Berapa Kapasitas Pengunjung Candi Borobudur?" <https://travel.kompas.com/11/07/2017>
- Kusno, Nur Adi. 2017. *Nilai Ruang Kawasan Wisata Borobudur*. The 6th University Research Colloquium 2017. Universitas Muhammadiyah Magelang. Hal 31- 36
- PT TWC. Program yang Sudah & Akan Dilaksanakan Oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) untuk Menunjang Pelestarian Candi Borobudur. Seminar *Pra Expert Meeting*, Magelang, 3 Oktober 2017
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung
- Susanty, Aries. Nia Budi Puspitasari. Conni Valinda. 2017. *Pengembangan Strategi Pariwisata Berbasis Ecotourism Pada Klaster Pariwisata Boro-budur - Dieng, Jawa Tengah*. Jurnal Teknik Industri, Vol. XII, No. 1, Januari 2017. UNDIP. Hal 57 – 76
- Wiratmoko, Bangun Aji. 2012. *Pengaruh Taman Wisata Candi Borobudur Terhadap Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Magelang 1980 – 1977*. Journal of Indonesian History, Vol 1. No. 2 Tahun 2012. Hal 125-133
- Yanuardi, Muhammad Hasmi. 2009. *Penyebab Kerusakan dan Pelapukan Beserta Penanganannya: Studi Atas Faktor Biotik dan Abiotik di Candi Borobudur*. Jurnal Sejarah Lontar. Vol. 6 No. 2 Juli - Desember 2009. Hal 29-37
- Zako, Bernards A. 2017. Activities that have been Implemented by UNESCO Office, Jakarta to Empower Communities Living in the Vicinity of the Borobudur and Prambanan World Heritage Temple Compounds. Pre Expert Meeting Seminar on Borobudur (Magelang, 3-5 October 2017).